

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2021/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AGUS SALIM**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**
3. NHK : **813869**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 4.675.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/20 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/35 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/15.2 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/7.3 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 25 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 16 m2/10 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/17 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 155.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA SKUTER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 90.500.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.920.500.000
III. HUTANG	Rp.	60.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.860.500.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.